

OPTIMALISASI IPM KALIMANTAN BARAT DENGAN STRATEGI EFEKTIVITAS DI SEKTOR PENDIDIKAN

OPTIMIZING THE HDI OF WEST KALIMANTAN WITH EFFECTIVENESS STRATEGY IN THE EDUCATION SECTOR

Dedek Kurniawati¹⁾, Siti Nur Asmah²⁾, Suryana^{3*)},

^{1,2,3}Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat, Kalimantan Barat

*e-mail: dedeknia19@gmail.com

ABSTRACT

The optimal development outcomes are represented in an effective education index. Besides, there are two components, that is, the health index and the purchasing power index which can also form the HDI. However, HDI, especially of West Kalimantan, were affected more by the education index than by the other two components. Therefore, it is expected that the effectiveness of education can be a solution to optimize HDI in other fields. One program of the Governor of West Kalimantan is providing free education as a support to optimize HDI of West Kalimantan. Besides, it is required to increase the community participation in education development. It is also necessary to optimally apply accurate strategies to overcome the problems in the education sector. With these efforts, it is expected to be able to answer the various development problems in West Kalimantan Province through increasing HDI in West Kalimantan.

Keywords: Strategy, HDI, West Kalimantan, Education

ABSTRAK

Representasi dari hasil pembangunan yang optimal adalah indeks pendidikan yang efektif. Selain itu, ada dua komponen seperti indeks kesehatan dan indeks daya beli yang juga dapat membentuk IPM. Namun, dibandingkan kedua komponen tersebut, indeks pendidikan adalah yang paling mempengaruhi IPM khususnya di Kalimantan Barat. Dengan demikian, diharapkan efektivitas pendidikan dapat menjadi solusi untuk mengoptimalkan IPM di bidang lain. Salah satu program dari Gubernur Kalimantan Barat adalah penyelenggaraan pendidikan gratis, yang merupakan dukungan terhadap pengoptimalan IPM di Kalimantan Barat. Selain itu, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan juga perlu dilaksanakan. Perlu juga dilaksanakan secara optimal penerapan strategi jitu sebagai usaha mengatasi permasalahan di bidang pendidikan. Upaya ini diharapkan dapat menjawab berbagai permasalahan yang ada di Kalimantan Barat khususnya untuk mendukung pembangunan Provinsi Kalimantan Barat melalui peningkatan IPM di Kalimantan Barat.

Kata kunci: Strategi, IPM, Kalimantan Barat, Pendidikan

PENDAHULUAN

Peringkat IPM Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) yang diketahui berada pada urutan 30 dari 34 provinsi di Indonesia merupakan permasalahan yang perlu dituntaskan sebab peringkat ini tergolong nilai yang rendah (Wikipedia, tt). Kondisi ini akan mempersulit Kalbar untuk bersaing dengan daerah lain. Pendidikan dapat menjadi solusi dalam pemecahan masalah tersebut. Pendidikan adalah investasi vital yang dibutuhkan setiap daerah. Dengan pendidikan, masyarakat dapat membangun sarana dan sistem pengelolaan daerah yang terarah. Oleh sebab itu, tidak heran pendidikan menjadi modal penting manusia di dunia pekerjaan.

Pendidikan juga menjadi fokus perhatian pejabat negara dan daerah untuk terus ditingkatkan. Hal tersebut dikarenakan pendidikan merupakan satu diantara indikator terjadinya pembangunan di suatu daerah. Sejalan dengan itu, paradigma pembangunan menempatkan manusia sebagai fokus dan sasaran akhir dari pembangunan yaitu, tercapainya penguasaan terhadap sumber daya, peningkatan pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan (Suharto, dalam Pake, 2018). Oleh karena itu, keberhasilan sektor pendidikan dalam mendukung upaya peningkatan IPM di Kalbar memerlukan dukungan dari pemerintah selaku eksekutif atau pemangku kebijakan. Perhatian pemerintah dalam sektor pendidikan akan berpengaruh besar dalam membentuk IPM yang baik. Semakin tinggi rata-rata tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat, maka semakin mudah bagi setiap individu dalam usia bekerja untuk memahami, mengimplementasi dan memperoleh hasil dari kemajuan teknologi. Selanjutnya, dapat pula

meningkatkan standar ekonomi dan hidup bangsa.

Berdasarkan uraian diatas, pemerintah daerah hendaknya menerapkan strategi khusus untuk meningkatkan IPM, terutama di Kalbar, misalnya, dengan merumuskan strategi untuk menekan kemerosotan dimensi pendidikan, dan dengan mencari tahu penyebab serta solusinya.

METODE

Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan melakukan rekapitulasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kalbar dari 2016-2018. Selanjutnya, data diolah dengan mendeskripsikan makna angka hasil rekapitulasi dari 2016-2018 dengan uraian kualitatif berupa teks deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibagi menjadi 4 kategori atau golongan yaitu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) rendah jika <60 , sedang $60 \leq \text{IPM} < 70$, tinggi $70 \leq \text{IPM} < 80$, dan ≥ 80 sangat tinggi (BPS, 2014).

Selanjutnya, pencapaian IPM Kalimantan Barat dan komponennya ditunjukkan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat dan Komponennya Tahun 2016, 2017, 2018

No.	Komponen	2016	2017	2018
1.	Angka Harapan Hidup	69,9	69,92	70,18
2.	Harapan	12,37	12,5	12,55

	lama sekolah			
3.	Rata-rata lama sekolah	6,98	7,05	7,12
4.	Pengeluaran per kapita	8348	8472	8860
5.	IPM	65,88	66,26	66,98

Sumber: Data BPS Kalimantan Barat 2018

Indeks pendidikan yang dibentuk berdasarkan pencapaian indikator. Sesuai dengan data BPS tahun 2018, persentase buta aksara untuk usia 15 tahun keatas menunjukkan Kalimantan Barat berada dalam posisi ke 6 dari 34 provinsi di Indonesia sebagai daerah yang paling besar persentase buta aksaranya. Rinciannya dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Pesentase Buta Aksara di Indonesia

No.	Provinsi	Persentase
1.	Papua	23,21%
2.	NTB	12,58%
3.	Sulawesi Selatan	8,19
4.	Jawa Timur	8,15
5.	NTT	8,10
6.	Kalimantan Barat	7,42
7.	Sulawesi Barat	7,15
8.	Bali	7,02

Merujuk kepada tabel diatas, kondisi buta aksara di Provinsi Kalimantan Barat perlu diperbaiki. Kondisi tersebut terjadi akibat banyak faktor. Selain itu, jika kondisi ini tidak segera ditindaklanjuti, akan berdampak besar ke komponen lainnya. Sesuai dengan visi, misi dan prioritas pembangunan daerah yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalbar 2013-2018, salah satu urusan wajib Pemerintah Daerah Provinsi

harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, cenderung mengalami peningkatan. Namun, peningkatan tersebut tidak signifikan. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh angka melek huruf penduduk Kalbar 10 tahun keatas pada tahun 2015 yang menunjukkan angka 91.81, kemudian pada tahun 2016 berada pada angka 93.28, dan terakhir tahun 2017 pada angka 93.25.

Kalimantan Barat adalah tentang pendidikan. Oleh sebab itu, pendidikan memang memerlukan perhatian khusus untuk segera diatasi permasalahannya.

Peran pemerintah setempat sangat penting untuk mendukung pembangunan pendidikan. Sejalan dengan pendapat (Meier dalam Winarti, 2014), semakin tinggi rata-rata tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, maka semakin mudah bagi setiap individu dalam usia bekerja untuk mengerti, menerapkan dan mendapatkan hasil dari kemajuan teknologi dan akhirnya meningkatkan standar ekonomi dan hidup bangsa. Suatu bangsa harus meningkatkan investasi bidang pendidikan dan kesehatan untuk mencapai pembangunan. Ditambahkan pula oleh Susye (2017) bahwa alokasi anggaran pendidikan adalah bentuk investasi jangka panjang dalam menumbuhkan daya saing di masa depan.

Menurut Ahmad (2017), semua negara menyadari bahwa kesuksesan suatu program kebijakan adalah salah satu indikator penyebab menurunnya tingkat kemiskinan. Oleh sebab itu, penentuan strategi dalam upaya perbaikan peringkat IPM di Kalbar berfokus kepada bidang pendidikan jika strateginya berhasil dijalankan. Uraian tersebut merepresentasikan

bahwa bidang pendidikan menjadi fokus utama yang dapat menunjang peningkatan IPM di Kalbar. Maka dari itu, diperlukan strategi pendukung untuk meningkatkan IPM di Kalbar melalui efektivitas di bidang pendidikan. Strategi berikut ini dapat dikembangkan untuk mendukung peningkatan indeks pendidikan dan penuntasan wajib belajar 12 tahun.

a. Strategi peningkatan indeks pendidikan dan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun. Program ini dikembangkan dalam dua jalur model program dan kegiatan prioritas, seperti:

a) Jalur pendidikan formal terdiri atas jenjang pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. Prioritas program dan kegiatan pendidikan formal dalam rangka penuntasan wajib belajar 12 tahun sebagai berikut:

(a) Penanggulangan siswa yang terancam dikeluarkan (*DO/Drop Out*) dengan pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu.

(b) Peningkatan sarana dan prasarana sekolah dengan sumber dana yang diperoleh dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

(c) Peningkatan daya tampung pendidikan dasar melalui pembangunan sekolah baru, sekolah terbuka dan sejenisnya.

b) Jalur pendidikan nonformal, pemanfaatan jalur ini untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang kurang beruntung (secara ekonomi, sosial, dan kultural) agar mendapatkan pemerataan kesempatan dan akses kepada pelayanan pendidikan khususnya pada jenjang

pendidikan dasar. Selain itu, kesempatan ini juga diharapkan dapat memberikan bekal hidup yang bermanfaat. Adapun program kegiatan ini meliputi:

(a) Kejar Paket A, Paket B dan Paket C sebagai alternatif program wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun melalui Pendidikan Luar Sekolah.

(b) Pemberantasan buta aksara oleh Dinas Pendidikan untuk menurunkan persentase buta aksara di Provinsi Kalimantan Barat, misalnya, dengan mengadakan paguyuban keaksaraan di daerah-daerah sasaran. Paguyuban tersebut hendaknya dikontrol setiap bulan.

b. Strategi Pembangunan Pendidikan dengan Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Upaya yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

a) Membentuk Komunitas Peduli Pendidikan, suatu perkumpulan yang melibatkan orang-orang yang mempunyai perhatian penuh dalam mengayomi dan menyelesaikan masalah pendidikan.

b) Mengupayakan kedisiplinan dalam birokratis masyarakat dengan tindakan sebagai berikut:

(a) Menawarkan sanksi kepada masyarakat yang tidak mau berpartisipasi,

(b) Menawarkan hadiah kepada mereka yang mau berpartisipasi,

(c) Melakukan persuasi kepada masyarakat, bahwa keikutsertaan masyarakat dalam kebijakan yang dilaksanakan akan

- menguntungkan masyarakat itu sendiri, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang,
- (d) Menghimbau masyarakat untuk berpartisipasi dalam serangkaian kegiatan.
 - (e) Mengaitkan partisipasi masyarakat dengan layanan birokrasi yang lebih baik,
 - (f) Menggunakan tokoh-tokoh kunci masyarakat yang mempunyai khalayak banyak untuk ikut serta dalam kebijakan agar masyarakat kebanyakan yang menjadi pengikutnya juga sekaligus ikut serta dalam kebijakan yang diimplementasikan,
 - (g) Mengaitkan keikutsertaan masyarakat dalam implementasi kebijakan dengan kepentingan mereka.
 - (h) Menyadarkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kebijakan yang telah ditetapkan secara sah. Kebijakan yang sah tersebut adalah salah satu dari wujud pelaksanaan dan perwujudan aspirasi masyarakat.

Beberapa strategi diatas dapat menjadi alternatif dalam upaya mendukung peningkatan IPM di Kalbar melalui efektivitas di bidang pendidikan. Berbagai upaya tersebut dapat berhasil jika strategi diterapkan dengan optimal. Sinergi antarlembaga dan peran masyarakat merupakan hal esensi yang tidak dapat dianggap sepele. Oleh sebab itu, pelaksanaan MoU/kerjasama antarlembaga serta pendekatan kepada masyarakat perlu diaktifkan dengan baik guna memperbaiki keadaan indikator IPM ke depan.

KESIMPULAN

Tujuan dari penelitian ini adalah membuktikan bahwa pendidikan merupakan suatu bidang penting yang menjadi objek perhatian khusus dan perlu untuk ditingkatkan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan strategi yang dapat diupayakan untuk mendukung peningkatan IPM di Kalbar.

Saran untuk penelitian selanjutnya untuk dapat menambahkan referensi strategi lainnya sehingga dapat mengoptimalkan upaya dalam meningkatkan IPM di Kalbar khususnya dan Indonesia umumnya.

REKOMENDASI

Lembaga pendidikan sebaiknya melakukan kerjasama dengan lembaga sosial dan pemerintah terkait untuk meningkatkan IPM daerah Kalbar. Bentuk kerjasama ini dapat berupa kesepakatan merencanakan program prioritas kenaikan IPM dan tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Selain itu, peran tenaga pendidik seperti guru sebaiknya tidak merasa puas dengan ilmu yang statis. Seharusnya, Dinas Pendidikan dapat memfasilitasi berbagai agensi untuk meningkatkan kompetensi guru, sehingga kedepan ilmu yang didapat oleh tenaga pendidik berdampak kepada proses dan hasil belajar individu yang maksimal.

Peran lembaga terkait dalam hal ini tidak cukup jika hanya dalam bentuk teori. Namun, harus ada bentuk nyata usaha yang dapat meningkatkan IPM Kalbar.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Syaifullah dan Nazaruddin, Malik. 2017. Pengaruh Indeks

Pembangunan Manusia dan Produk Domestik Bruto terhadap Tingkat Kemiskinan di Asean 4 (Studi pada 4 Negara ASEAN). *Jurnal Ilmu Ekonomi*. Volume 1 Jilid 1 Tahun 2017.

Lengkong, Susye Marlen Ketsy dkk. 2017. Pengaruh Alokasi Anggaran Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Bitung. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*. Volume 19 Nomor 2.

Seftiawan, Dhita. (2018, 4 September). Masih ada 34 Juta Orang Buta Huruf di Indonesia. Dikutip 8 Agustus 2019: <https://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/2018/09/04/masih-ada-34-juta-orang-buta-huruf-di-indonesia-429732>.

Winarti, (2014:41) Analisis Pembangunan Manusia Fungsi Kesehatan dan Infrastruktur terhadap Pencapaian Masyarakat Kota Jawa Tengah